

REFORMASI BIROKRASI 4.0 : STRATEGI MENGHADAPI REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Dunia hari ini sedang mengalami suatu perubahan besar, yaitu Revolusi Industri (R.I) 4.0. Revolusi Industri (R.I) 4.0 merupakan perubahan dalam mekanisme produksi barang dan jasa yang ditandai dengan sejumlah ciri, yaitu penggunaan *Internet of Things* (IoT), *big data*, otomasi, robotika, komputasi awan, hingga inteligensi artifisial (*Artificial Intelligence*). Perubahan ini dirasakan tidak hanya oleh sektor swasta, tetapi juga oleh organisasi pemerintah. Selain berbagai peluang yang ditawarkannya, era Revolusi Industri (R.I) 4.0 menimbulkan berbagai persoalan publik baru yang harus dihadapi, seperti polemik transportasi daring; ancaman *e-commerce* terhadap toko/*retail* konvensional; kejahatan siber, dsb. Oleh karenanya, organisasi pemerintah harus melakukan reformasi besar untuk dapat berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya di era Revolusi Industri (R.I) 4.0 ini.

Reformasi birokrasi (RB) 4.0 merupakan gagasan strategi yang dapat diterapkan organisasi pemerintah untuk menghadapi Revolusi Industri (R.I) 4.0. Reformasi birokrasi (RB) 4.0 mencakup tiga aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Reformasi birokrasi (RB) 4.0 ini merupakan kelanjutan dari gagasan reformasi birokrasi yang sudah berjalan saat ini. Dengan tambahan dimensi kolaborasi, inovasi dan pemanfaatan TIK, maka pemerintah diharapkan dapat menerima manfaat maksimal dari Revolusi Industri (R.I) 4.0. Sementara disisi lain mampu meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari Revolusi Industri (R.I) 4.0.

Kolaborasi

Collaborative governance merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk menghadapi era R.I 4.0. Kolaborasi antara instansi pemerintah dengan berbagai pihak memungkinkan untuk menutupi celah kekurangan, mengantisipasi perubahan yang cepat dan dapat mengefisienkan penggunaan sumber daya (Cahyono, 2018). Dari sudut pandang pemerintah sebagai aktor utama, *collaborative governance* dapat dimaknai sebagai cara memerintah dimana satu atau beberapa instansi pemerintah melibatkan *stakeholder* diluar lembaga pemerintah dalam pengambilan keputusan bersama yang bersifat formal, berorientasi konsensus, deliberatif dan bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik (Ansell & Gash, 2007).

Penerapan *Collaborative governance* dapat memberikan ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan; meminimalkan konflik dan menguatkan modal sosial antar *stakeholder*; dan menyediakan ide dan sumberdaya yang bervariasi untuk menyelesaikan masalah (Kim, 2015). Fenomena *internet of things* dalam R.I 4.0 menyediakan peluang besar yang mendukung dan memudahkan kolaborasi. Walau demikian, terdapat banyak tantangan yang harus diantisipasi pemerintah untuk mewujudkan kolaborasi yang efektif. Tantangan tersebut diantaranya adalah persoalan ketidakseimbangan kekuasaan antara para aktor; sumber daya yang peluang yang tidak terdistribusi dengan baik; dan pola komunikasi tidak efektif (Kim, 2015).

Inovasi

Strategi berikut yang dapat dilakukan pemerintah di era Revolusi Industri (R.I) 4.0 adalah melakukan inovasi dalam berbagai bidang tugasnya. Inovasi pada dasarnya merupakan implementasi dari ide-ide baru. Dalam konteks sektor publik, inovasi adalah pelaksanaan dari ide-ide baru dan baik untuk menghasilkan dampak dan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan pelayanan publik. Inovasi memiliki empat tahapan, yaitu pencarian ide (*generation of ideas*); pemilihan ide (*selection of ideas*);

pelaksanaan ide baru tersebut (*implementation of new ideas*); dan diseminasi ide baru tersebut (*dissemination of new practice*) (Sorensen & Torfing, 2011).

Dewasa ini, inovasi di instansi pemerintah di Indonesia sudah diterapkan. Sudah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah yang memiliki inovasi di berbagai bidang tugas dan fungsinya, terutama dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Hal ini merupakan modal yang baik untuk dapat menghadapi R.I. 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat mendukung pelaksanaan inovasi, yaitu pemimpin yang visioner; kepemimpinan yang terbuka; pemangku kepentingan yang kolaboratif; dan partisipasi masyarakat (Prasetyo, Wicaksono, Herwanto, Mulyadi, & Malik, 2016). Selain itu, isu lain yang perlu diperhatikan dalam penerapan inovasi di sektor publik adalah keberlanjutan inovasi. Terkait dengan isu tersebut, beberapa faktor yang berpengaruh dalam menentukan keberlanjutan inovasi di instansi pemerintah adalah adanya budaya untuk memberikan umpan balik (*feedback*); akuntabilitas dan pembelajaran (*learning*) yang berkelanjutan (Acker & Bouckaert, 2017).

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan ciri utama dari Revolusi Industri (R.I) 4.0. Dengan demikian, teknologi ini pun harus diterapkan di organisasi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penerapan konsep *e-government* di instansi pemerintah telah dimulai sejak tahun 2001. Dan sampai saat ini, organisasi pemerintah di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun Daerah berlomba lomba untuk dapat memanfaatkan TIK di organisasinya. Walau demikian, tingkat pemanfaatan TIK di Indonesia masih kalah dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh PBB, Pada tahun 2016, peringkat pengembangan *e-government* (*E-government development rank*) Indonesia ada pada peringkat 116. Peringkat Indonesia jauh tertinggal dibawah Thailand, Philipina, Malaysia dan singapura. Thailand memperoleh peringkat 77; Philipina berada diperingkat 71; Malaysia memperoleh peringkat 60; dan Singapura berada pada peringkat (*E-Government Survey 2016 E-Government in Support of Sustainable Development*, 2016). Selain itu, peringkat pengembangan *e-government* Indonesia berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005, Indonesia memperoleh peringkat 96 (*Global E-Government Readiness Report*, 2005). Pada tahun 2010, Indonesia dapat berada pada peringkat 109 (*E-Government Survey 2010 Leveraging E-Government at a time of financial and economic crisis*, 2010). Dan pada tahun 2016, peringkat Indonesia turun menjadi 116 (*E-Government Survey 2016 E-Government in Support of Sustainable Development*, 2016).

Data ini menunjukkan bahwa pemanfaatan TIK di level organisasi pemerintah masih harus terus ditingkatkan. Menurut Penelitian yang dilakukan di tingkat instansi pemerintah pusat, ada dua dimensi dalam pengelolaan TIK yang perlu diperhatikan, yaitu dimensi perencanaan dan dimensi infrastruktur. Instansi pemerintah pusat masih belum memiliki perencanaan pengembangan *e-government* yang memadai. Terkait dengan infrastruktur, hasil penelitian menyebutkan bahwa infrastruktur TIK yang tersedia sudah memadai. Namun infrastruktur tersebut belum dikelola baik dan tingkat keamanannya masih rendah (Nurrohmah, Dewi, & Sahadi, 2017). Sementara itu, di level pemerintah daerah hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memiliki kepemimpinan yang kuat, rencana induk yang jelas dan kesiapan secara sistematis dalam mengarahkan pembentukan sistem *e-Government* yang standar (Oetomo, 2016). Tantangan-tantangan ini harus dihadapi pemerintah untuk dapat mengoptimalkan penggunaan TIK di era Revolusi Industri (R.I) 4.0.

Ketiga dimensi di atas pada dasarnya sudah dilaksanakan oleh instansi pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah, walaupun belum komprehensif dan masih harus ditingkatkan. Hasil penelitian juga menunjukkan banyak tantangan yang harus dihadapi untuk dapat

mengimplementasikan ketiga strategi tersebut. Namun, dimensi tersebut harus dilakukan agar pemerintah mampu menghadapi perubahan besar yang terjadi saat ini. (Shafiera Amalia)

Referensi :

- Acker, W. Van, & Bouckaert, G. (2017). What makes public sector innovations survive ? An exploratory study of the influence of feedback , accountability and learning Wouter van Acker and Geert Bouckaert, (2011). <https://doi.org/10.1177/0020852317700481>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18, 543-571.
- Cahyono, E. (2018). Revolusi Industri 4.0 dan Transformasi Organisasi Pemerintah. Retrieved from <http://setkab.go.id/revolusi-industri-4-0-dan-transformasi-organisasi-pemerintah/>
- E-Government Survey 2010 Leveraging E-Government at a time of financial and economic crisis.* (2010). New York.
- E-Government Survey 2016 E-Government in Support of Sustainable Development.* (2016). New York. Retrieved from <http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN97453.pdf>
- Global E-Government Readiness Report.* (2005). New York. Retrieved from <https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2005-Survey/Complete-survey.pdf>
- Kim, S. (2015). The Working of Collaborative Governance: Evaluating collaborative community building initiative in Korea. *Urban Studies Journal*, 1-19.
- Nurrohmah, I., Dewi, M. A. ., & Sahadi, N. (2017). Measuring the e-Government Maturity in Indonesia using the Ranking of e-Government of Indonesia (PeGI). *American Scientific Research Journal for Engineering, Technology, and Sciences (ASRJETS)*, 32(1), 49-63.
- Oetomo, B. S. . (2016). Kesiapan Pemerintah Dalam Mengembangkan Sistem E-Government. *Jurnal Eksis*, 9(2), 98-104.
- Prasetyo, P. ., Wicaksono, K. ., Herwanto, T. ., Mulyadi, G., & Malik, R. . (2016). *Proses dan implikasi innovative governance terhadap kualitas pelayanan publik di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut.* Bandung.
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. *Jurnal Administration&society*, 43(8), 842-868.